



**MUKOMUKO**

**SENIN, 08 NOVEMBER 2021**

**SUMBER BERITA**

<b>X</b>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Soal Aset Pasar, Belum Mampu Bertindak**

**MUKOMUKO** - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Mukomuko belum dapat bertindak terkait bangunan megah bernilai miliaran di Pasar Koto Jaya. Baik itu untuk penyelesaian pembangunannya maupun untuk mengerahkan pedagang menempati bangunan tersebut.

Kepala Disperindagkop dan UKM Mukomuko, Agus Harvinda, ST, M.Si mengatakan, salah satu kendala lantaran bangunan itu belum menjadi aset Pemkab Mukomuko. Sehingga kegiatan rehabilitasi terhadap bangunan tersebut belum dapat dilaksanakan.

"Bangunan itu belum tercatat sebagai aset. Jadi rehab belum bisa. Sementara pedagang belum mau menempati bangunan itu, dengan alasan ketika siang panas yang menyebabkan sayuran mereka cepat layu," kata Agus Harvinda.

Kendati begitu, diakuiinya, pemerintah pusat sudah melimpahkan bangunan itu ke Pemkab Mukomuko. Namun Pemkab tetap tidak bisa melaksanakan perbaikan, karena pembangunan bangunan tersebut belum benar-benar rampung sebagaimana perencanaannya.

"Jadi target kita, menyelesaikan pekerjaan dulu. Sementara ini untuk menyelesaikan itu belum tersedia anggaran yang memadai," jelasnya.

Ditambah Kabid Perdagangan, Hutri Wahyudi, SE, tahun 2019, pernah direncanakan melanjutkan penyelesaian pembangunan. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 1,5 miliar, namun hanya muncul sekitar Rp 1 miliar. "Jadi saat itu kita tangani sesuai dana yang ada. Tapi hasilnya seluruh item yang jadi perencanaan awal tetap belum selesai," jelasnya.

Selanjutnya tahun 2020 diajukan dana Rp 500 juta untuk pemasangan instalasi listrik, dan sumur bor. Akan

tetap, dana itu tergerus lantaran adanya pandemi Covid-19.

"Di 2021 sempat diajukan, tapi tidak diakomodir. Jadi seperti penanganan atap, supaya bisa mengakomodir keinginan pedagang, tetap pekerjaannya baru bisa dilakukan ketika rehab. Kita masih butuh sekitar Rp 500 jutaan lagi," terang Hutri.

Hutri menegaskan, seluruh bagian bangunan yang bisa ditempati akan kembali diaktifkan. Mereka yang tidak aktif membuka usaha pada lossnya, maka akan dilakukan evaluasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan langsung ditarik sepenuhnya oleh Pemkab.

"Sekarang ini hanya bangunan bagian luar yang bisa kita manfaatkan. Kalau bagian dalam belum. Yang menyimpan barang saja di los-los yang ada itu, kita akan keluarkan. Karena banyak peminat dari luar hendak mengisi tempat-tempat berjualan di sana," ungkapnya. (hue)